

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristoteles (2018). Retorika. Terjemahan W. Rhys Robert. Yogyakarta: BasaBasi.
- Evert Tuturoong, Dkk., Christian (2021). Satu Dekade Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia: Analisis Tender 2011-2020 & Pemanfaatan Opentender.net oleh Publik. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Fahmi Lubis, Dkk., Andi (2017). Hukum Persaingan Usaha Buku Teks, Edisi Kedua. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Fuady, Munir (1999). Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jaja Raharja, Sam'un (2017). Analisis Strategi Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Di Provinsi Jawa Barat. Bandung: ITB.
- Khamal Rokan, Mustapa (2017). Persekongkolan Tender di Indonesia: Perspektif Hukum dan Analisis Putusan KPPU tentang Persaingan Usaha. Depok: Prenamedia Group.
- Kostyó, Kenneth (2006). Handbook - Curbing Corruption in Public Procurement. Buku Panduan - Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Berlin, German: Transparency International.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (ed), Kompetisi. (Jakarta: KPPU, 2011).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (ed), Laporan Tahun 2009. (Jakarta: KPPU, 2009).
- Kusumohamidjojo, Budiono (2011). Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil. Bandung: CV Mandar Maju.
- Leback, Karen (2018). Teori-Teori Keadilan. Cetakan ke-6. Diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.
- Maryanto (2017). Dunia Usaha Persaingan Usaha Dan Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Jawa Tengah: Uninssula Press.
- Nations Officer of the High Commissioner for Human Right, United (2010). The Right to Water. Fact Sheet No. 35. Agustus 2010.
- Pengawas Persaingan Usaha, Komisi (ed.) (2009). Pedoman pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Pengawas Persaingan Usaha, Komisi (ed.) (2011). Pedoman pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- PPN/Bappenas, Kementrian (ed.) (2021). Peta Jalan Perluasan Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum 2021-2025. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas.

- R. Saliman, Abdul (2017). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rhiti, Hyronimus (2011). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers. Jakarta.
- Suratman, Adji (2014). Etika Bisnis Dan Profesi Konsep Dan Implementasi. Jakarta: Mandala Nasional.
- Sudarma Sumadi, Putu (2017). Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?). Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Jurnal

- Azhar, Khadijah, Dkk.. “Pengaruh Akses Air Minum Terhadap Kejadian Penyakit Tular Air (Diare dan Demam Tifoid) (The Influence of Drinking Water Access on the Occurrence of Water-borne Diseases (Diarrhea and Typhoid)”. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 17 No. 2 April 2014.
- Cakrafaksi Limuris, Fachriza. “Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, JURNAL JENTERA Volume 4, No. 2 Desember 2021.
- Christian Yosua, Sondra. ”Analisa Kedudukan Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 663/K.Pdt/Sus/2011 dan Putusan Perkara nomor 796/K/Pdt/SUS/2010”, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2012).
- Devi Yustisia Utami, Putu, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Volume 6 Number 2 Desember 2020.
- Junaedi, Muhammad. “Sanitasi, Pengelolaan dan Akses Air Bersih Untuk Peningkatan Kesehatan di Indonesia”, Jurnal Tampiasih. Vol.1, No.1, (2022).
- Khoirunnisa, Nadia. “Peran Penyeleggara Air Minum Dalam Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum”, Makalah, diterbitkan di INA-Rxiv Papers, (Jakarta:FT Trisakti, 2019).
- Made Djaja, I, dkk., “Pengembangan Akses Air Minum di Pedesaan: Penyediaan Air Berbasis Masyarakat untuk Mencapai Akses Air Minum Aman di Banjar Dauh Peken, Bali”, Journal of Public Health and Community Services – JPHCS, Vol. 1, No. 1 – Mei 2022.
- Pengawas Persaingan Usaha, Komisi. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 14/KPPU-L/2019. Abdul Mudjib Rizal M, Sri Maharani MTVM, “Problematika

- Tender Pelelangan dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Simposium Hukum Indonesia”, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Qur’Ani Islamiyah, Nurul, Dkk., “Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Di Era Pandemi Covid – 19 Di Kelurahan Warugunung, Kota Surabaya”, Socia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 19, No. 1, Juni 2022.
- Rena Mayasari, Tri. “Clustering Akses Air Bersih Dan Sanitasi Layak Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung”, Prosiding, Disampaikan pada Seminar Nasional Official Statistics 2019 tentang Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s, (Lampung: Badan Pusat Statistik, 2019).
- Ristiyanto, Nirwan. “Audit Investigatif Atas Dugaan Penggelembungan Harga Pengadaan Barang”, Makalah, disampaikan diwebsite <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id>, (Ciawi: Pusdiklatwas BPKP, 2013).
- Sihotang, Lesson. “Peranan KPPU dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat Persekongkolan: Studi Kasus Putusan No. 14/KPPU-L/2019)” Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) Jurnal Humaniora, Edisi Desember 2021.
- Taufik, Mohammad, Dkk., “Study of Government’s Strategy Indonesia”, Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, Vol. 21 (1), 2022.
- Widyastuti, Endah, & Fitriah Faisal. “Implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat” Jurnal Delarev, Volume 2, Nomor 3, Desember 2023. Ali Maskur, “Perilaku Pemilih dalam Menentukan Keputusan Politik di Indonesia pada Awal Era Reformasi”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), JIAP Vol 7, No 3, pp 341-349, 2021.
- Wilopo, “Perencanaan Strategik Pembangunan Daerah”, Makalah, disampaikan Kursus Singkat Capacity Building Untuk DPRD, (Malang: Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian, 2012)
- Yusdiyanto, “Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/ MENKES/ SK/ VII/ 2002.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU-I/2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 406).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum Depot Air.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Air Minum Depot Air.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (<https://kppu.go.id/>: 29 HLM).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63, jdih.setneg.go.id: 47 hlm.).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, Lembaran Lepas Sekretariat Kenegaraan: 115 hlm.).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817, Lembaran Lepas Sekretariat Kenegaraan: 29 hlm.).

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846, Lembaran Lepas Sekretariat Kenegaraan: 35 hlm.).

Website

Asosiasi Perusahaan Pengelola Air Minum dan Sanitasi Indonesia (APPAMSI), “Peran Penting PDAM Bagi Masyarakat”, <https://appamsi.co.id/peran-penting-pdam-bagi-masyarakat/>.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)”, <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/48/Tugas-Fungsi-dan%20Wewenang.bpkp>.

Badan Pusat Statistik, “Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi, 2017”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRlJKUjFSTlp6MDkjMw==/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-provinsi--2017.html?year=2017>.

Badan Pusat Statistik, BPK dan KPPU Menyepakati Kerjasama Dalam Penanganan Persaingan Usaha Tidak Sehat, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-dan-kppu-menyepakati-kerjasama-dalam-penanganan-persaingan-usaha-tidak-sehat>.

Badan Pusat Statistik, Pengelolaan Keuangan Negara harus Transparan dan Akuntabel, <https://www.bpk.go.id/news/pengelolaan-keuangan-negara-harus-transparan-dan-akuntabel>.

Ekonomi, Universitas Bung Hatta, “Pasar Monopolistik – Pengertian, Contoh dan Ciri Ciri”, <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/509-pasar-monopolistik-pengertian-contoh-dan-ciri-ciri#:~:text=Didalam%20pasar%20monopolistik%20dapat%20ditemukan,keunikan%20C%20dan%20kualitas%20yang%20berbeda>.

Fadhli Rizal Makarim, “Konsumsi Air Minum yang Terkontaminasi Sebabkan Tifus”, <https://www.halodoc.com/artikel/konsumsi-air-minum-yang-terkontaminasi-sebabkan-tifus>.

Hukumonline.com, “MK Batalkan UU Sumber Daya Air”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air-lt54e4bd8e5dc0a/#!>.

Humassulbar, “Komitmen Biro PBJ dalam Penerapan Zona Integritas, Bentuk Tim Kerja Pemenuhan Dokumen Rencana Pembangunan ZI”, <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/5402-komitmen-biro-pbj-dalam-penerapan-zona-integritas-bentuk-tim-kerja-pemenuhan-dokumen-rencana-pembangunan-zi>,

kpbu.kemenkeu.go.id/, “Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?”, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta>.

KPK, “KPK: Cegah Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa, E-Katalog Harus Diawasi Bersama”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3451-kpk-cegah-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-e-katalog-harus-diawasi-bersama>.

- PDAM PINTAR. “Sejarah Perusahaan Air Minum di Indonesia”, <https://pdampintar.id/blog/lainnya/sejarah-perusahaan-air-minum-di-indonesia/>.
- Pusdiklat Pemda, “Bimbingan Teknis Unit Layanan Pengadaan (ULP)-Bimtek PBJ”, <https://www.pusdiklatpemda.com/bimbingan-teknis-unit-layanan-pengadaan-ulp-bimtek-pbj/>, 19 Mei.
- Tim Hukum Online, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all), 12 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>
- [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat-hol18357/), “Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat-hol18357/>.
- Tim Hukum Online, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/), 6 Februari 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>
- Tim Kominfo BPKP/FR, “BPKP dan LKPP Kolaborasi Kawal Pengadaan Barang dan Jasa”, <https://www.bpkp.go.id/berita/read/38582/0/BPKP-dan-LKPP-Kolaborasi-Kawal-Pengadaan-Barang-dan-Jasa>.
- Wihana Kirana Jaya, “Mengenal Lebih Dekat Teori Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economic)”, <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/829-mengenal-lebih-dekat-teori-ekonomi-kelembagaan-baru-new-institutional-economic>.